

KEARIFAN LOKAL DALAM KEBERAKSARAAN

Oleh
Deditianti Tri Indrianti, S.Pd.,M.Sc

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk merumuskan pola pendidikan keaksaraan fungsional dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal pada masyarakat perdesaan di Kabupaten Jember. Fokus kajian penelitian dilatarbelakangi adanya kondisi bahwa masyarakat perdesaan merupakan penyandang buta aksara terbesar di Kabupaten Jember. Disisi lain proses pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan hanya mengenalkan huruf dan angka saja. Oleh karena itu, perlu cara yang tepat dan mendasar sebagai bentuk percepatan pemberantasan buta aksara yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat. Pola pendidikan keaksaraan fungsional yang dihasilkan dari kegiatan penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi aplikatif bagi para penentu kebijakan guna mengurangi dan menuntaskan jumlah buta aksara di Kabupaten Jember, terutama pada masyarakat perdesaan.

Data penelitian yang dikumpulkan pada kegiatan penelitian ini bersifat primer dan skunder, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan *mix metode*(menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif).Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta pengamatan terlibat. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara terstruktur melalui diskusi kelompok (*Fokus Group Discussion*) dan angket. Hasil penelitian ini diharapkan terbit dalam jurnal terakreditasi serta pengayaan buku modul pembelajaran, khususnya pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah.

Dari hasil observasi ditemukan adanya potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dapat dikembangkan dalam kegiatan program keaksaraan fungsional. Dimana tatanan masyarakat secara lokal dapat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Kearifan Lokal, Keaksaraan Fungsional, Masyarakat Perdesaan*

I. PENDAHULUAN

Selama ini program pendidikan keaksaraan fungsional masih diyakini sebagai salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah ketidakberdayaan masyarakat akibat kurangnya ilmu pengetahuan (*lack of intellegencea*). Dimana dasar ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengenalan aksara sebagai modal memperkaya konsep diri. Untuk itu, pelaksanaan program pendidikan keaksaraan fungsional dilakukan dengan meningkatkan kompetensi

masyarakat dalam aspek: berbicara, mendengar, membaca, menulis dan berhitung (bingarcalistung). Tujuannya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan akses yang berpengaruh terhadap sumber kebutuhan hidup, agar terwujud masyarakat berdaya dan sejahtera.

Namun, proses pembelajaran yang diterapkan pada program pendidikan keaksaraan fungsional selama ini hanya mengenalkan huruf dan angka saja. Akibatnya pembelajaran tidak menarik bagi warga belajar. Kondisi tersebut dapat dilihat dari menurunnya kehadiran serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini, menuntut pelaku pendidikan untuk menemukan inovasi dan strategi pembelajaran yang lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup warga belajar. Mengingat, warga belajar program keaksaraan fungsional adalah orang dewasa yang belajar jika merasa butuh. Disisi lain, masyarakat memiliki kearifan lokal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan dan dikembangkan

Sebagaimana kondisi di Kabupaten Jember, yang sejak tiga tahun terakhir ditetapkan sebagai daerah yang memiliki penyandang buta aksara tertinggi di Indonesiasejumlah 1.945.600 jiwa (Laporan USAID-DBE1, 2011).Disisi lain Kabupaten Jember merupakan daerah yang subur dan strategis. Namun, sebagian masyarakatnya masih belum memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lain yang tersedia. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat, masyarakat Kabupaten Jember sebagian besar tinggal didaerah perdesaan degan berbagai kearifan lokal

Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2013 menghasikan, bahwa terdapat kearifan lokal masyarakat dalam bentuk tatanan sosial sebagai wujud strategi adaptasi menghadapi kemiskinan. Untuk itu, kegiatan pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional tidak hanya menekankan aspek bingarcalistung, tetapi lebih pada memberikan materi pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi kehidupan warga belajar. Terutama untuk menanggulangi masalah kemasyarakatan. Untuk itu, tingkat keberhasilan program pendidikan keaksaraan fungsionaltidak lagi diukur dari kemampuan warga belajar dalam menggunakan keterampilan bingarcalistung.

Akan tetapi lebih dilihat dari kemampuan berfikir kritis guna memecahkan masalah dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal.

Ironisnya hal tersebut belum menjadi tolak ukur keberhasilan program. Bahkan, potensi lokal dalam masyarakat belum menjadi fokus perhatian pemerintah serta belum menjadi indikator utama dampak program. Perhatian ini berguna sebagai dasar mengembangkan program pemberantasan buta aksara guna meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui gerakan kritis transformatif. Mengingat, masyarakat memiliki tatanan sebagai wujud interkoneksi antara berbagai sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amin (2005:172), bahwa masyarakat yang mendiami suatu bentang ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat dari satu kesatuan. Dimana, keberadaan lembaga sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan mampu menjamin stabilitas kelangsungan hidup masyarakat karena terbentuk atas kepentingan kolektif yang sesuai norma dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal.

Dari uraian di atas tergambar bahwa program pendidikan keaksaraan sebagai gerakan untuk mempercepat pemberantasan aksara perlu dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Mengingat masyarakat perdesaan memiliki berbagai tatanan sebagai bentuk strategi adaptasi dalam menghadapi berbagai masalah kemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya strategi baru dalam memberantas buta aksara yang sesuai dengan tatanan masyarakat lokal.

II PEMBAHASAN

Pendidikan Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Penyadaran Kritis

Buta aksara dan ketidakberdayaan perempuan buruh perkebunan merupakan masalah kemanusiaan terkait kemiskinan. Oleh karena itu, perlu kebijakan komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan secara regional maupun nasional guna menyelesaikan akar penyebab masalah tersebut. Tujuannya, membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan mampu merespon situasi yang berpengaruh sebagai sumber-sumber kelangsungan hidup serta

mampu melakukan pembacaan kondisi sosial disekitarnya. Pembacaan tersebut merupakan instrumen dalam memperbaiki kehidupan.

Bagi Freire (dalam Smith:2001), bahwa upaya penyadaran pada akhirnya bermuara pada pembebasan yang diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program pendidikan keaksaraan fungsional, sebagai program pemberdayaan yang mengkombinasikan kegiatan belajar bingarcalistung (berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berhitung), dan keterampilan fungsional. Tujuan program keaksaraan fungsional mengupayakan kemampuan pemahaman dan penyesuaian diri guna mengatasi masalah hidup serta membangun masyarakat untuk melakukan perubahan.

Untuk itu, pendidikan keaksaraan fungsional perlu dilihat, dianalisis, dan dipahami dalam kerangka penyadaran kritis. Dimana terdapat perubahan dari situasi kehidupan masyarakat parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*). Menurut Sudjana (2004: 279) ciri masyarakat belajar adalah: *pertama*, masyarakat gemar mencari informasi guna memenuhi kehidupannya. *Kedua*, masyarakat gemar menemukan informasi. *Ketiga*, masyarakat gemar menulis dan menyampaikan informasi, dan *keempat* masyarakat gemar melakukan kegiatan belajar secara berkelanjutan atas kesadaran bahwa belajar bagian dari kehidupan, sehingga perlu proses pembelajaran yang responsif dan sesuai konteks sosial.

Potensi Kearifan Lokal pada Komunitas Masyarakat Perdesaan

Komunitas lokal memiliki kelembagaan yang berpotensi terhadap akses sumber ekonomi serta memiliki perangkat institusi sosial yang melembaga sebagai wujud kecerdasan lokal (*local geneus*) dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Sugiyanto (2002;27), bahwa tatanan masyarakat tumbuh akibat tingkahlaku yang diulang guna menuhi kebutuhan dan melekat pada pola kehidupan masyarakat. Dimana keberadaan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal dapat membangkitkan martabat kaum lemah, menghambat

internalisasi ketidakadilan, dan menciptakan berbagai saluran bagi kelompok terpinggir untuk bersuara dan membuat perubahan yang berarti (Anonim: 2006:79). Oleh karena itu kelembagaan masyarakat efektif guna meningkatkan keberdayaan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sugiyanto (2002;38) kelembagaan masyarakat diartikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan memiliki anggota yang berkembang secara dinamis melalui dimensi kehidupan masyarakat. Secara abstrak lembaga sosial merupakan peraturan atau norma untuk mengatur persoalan dan perilaku anggotanya. Koentjaraningrat dalam Soekanto (1990: 217), mengatakan lembaga masyarakat sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Kelembagaan masyarakat pada umumnya terbentuk dari ikatan sosial guna menciptakan kesepakatan sosial yang mengikat.

Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat ditingkat lokal penting untuk dipertimbangkan guna dijadikan sarana melakukan penyadaran terhadap masyarakat perdesaan. Dimana penyadaran dilakukan sebagai awal guna memberikan kapasitas untuk kemudian didayagunakan dalam melakukan akses terhadap berbagai sumber kehidupan. Untuk itu, dalam penelitian ini tergambar pentingnya program pendidikan keaksaraan fungsional berbasis komunitas lokal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat guna menyelesaikan masalah kemiskinan pada masyarakat perdesaan. Dimana kompleksitas interaksi sosial dan alam dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan pola fenomenal dan spesifik lokal, sehingga masyarakat perdesaan menjadi manusia kritis dan menjadi lebih peka dalam menghadapi berbagai tekanan sosial.

Kondisi Demografi Penduduk

Padadarnya Kabupaten Jember tidak memiliki penduduk asli, dan hampir semua pendatang. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Jember merupakan daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat khususnya dibidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari sumber penghidupan. Namun demikian, mayoritas

penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan komposisi penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (*migrasi*). Adapun komposisi penduduk berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah penduduk Kelurahan Antirogo tercatat sebanyak 10.341 jiwa, terdiri atas 5.407 jiwa perempuan dan 4.935 jiwa laki-laki, dengan rasio 91,27, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.322,38 jiwa/Km². Luas wilayah Kelurahan Antirogo adalah 7,82 Km².

Pendidikan

Secara kualitas, sumberdaya manusia di Kelurahan Antirogo relatif rendah dibandingkan daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Sumbersari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Banyaknya Penduduk Usia 5 tahun ke Atas Berdasarkan Kemampuan Berbahasa Indonesia

No	Kelurahan	Kemampuan Berbahasa Indonesia	
		Mampu	Tidak mampu
1	Kranjingan	11.663	1.084
2	Wirolegi	9.862	1.276
3	Karangrejo	13.533	982
4	Kebonsari	25.660	426
5	Sumbersari	33.269	428
6	Tegalgede	7.893	590
7	Antirogo	7.504	1.634
	Jumlah	109.384	6.420

Sumber: Sumbersari dalam angka, 2011

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa masih banyak ditemukan masyarakat di Kelurahan Antirogo yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk melakukan akses informasi relatif kurang. Mengingat berbagai informasi selalu disajikan dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini juga berdampak pada pemenuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Kualitas sumberdaya manusia juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Antirogo. Dimana sebagian besar masyarakat di Antirogo hanya memperoleh pendidikan rendah. Sebagaimana data yang dihimpun oleh BPS 2011 bahwa, masih terdapat 2.194 jiwa yang tidak/ belum pernah sekolah. Bahkan yang memiliki pendidikan SLTA/ sederajat hanya 673 jiwa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, berdampak pada kemiskinan bagi sebagian besar warga masyarakat. Mengingat, rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap rendahnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan politik. Dimana kondisi tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga

Untuk itu perlu diselenggarakan berbagai program pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai bekal hidup. mengingat sebagian besar masyarakat di Kelurahan Antirogo belum mendapat akses pendidikan formal yang maksimal. Untuk itu, perlu diselenggarakan pendidikan nonformal yang dapat menjadi pelengkap, penambah, maupun pengganti pendidikan formal guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan memadai dalam memasuki pasar kerja. Salah satu program pendidikan non formal antara lain adalah program pendidikan keaksaraan fungsional yang sesuai yang dengan potensi lokal. Harapannya masyarakat melalui program pendidikan tersebut, masyarakat dapat mengelola potensi lokal secara maksimal.

Dalam hal ini program pendidikan keaksaraan fungsional tepat untuk diselenggarakan di Kelurahan Antirogo. Mengingat secara astronomis maupun geografis Kelurahan Antirogo berada di pusat kota Kabupaten Jember. Namun, masih terdapat kantong kemiskinan.

Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan antirogo masih tergolong miskin dibandingkan wilayah lain yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang masih tergolong prasejahtera karena alasan ekonomi sebanyak 885 rumah tangga sedangkan

keluarga yang tergolong keluarga sejahtera I sebanyak 741 keluarga, keluarga sejahtera II sebanyak 641, keluarga sejahtera III sebanyak 390 dan keluarga sejahtera III + sebanyak 288.

Meskipun sektor pertanian di Kelurahan Antirogo merupakan penyangga utama perekonomian masyarakat, tetapi peran tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara perlahan tetapi pasti. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lahan pertanian yang telah berubah menjadi perumahan maupun perkantoran, serta gedung sarana pendidikan. Mengingat, pemekaran wilayah Kabupaten Jember dikembangkan di Kelurahan Antirogo, sebab Kelurahan Antirogo berdampingan dengan perguruan tinggi. Untuk itu masyarakat Kelurahan Antirogo sudah seharusnya memiliki sumber ekonomi yang dapat dikembangkan selain disektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkembangnya industri kerajinan anyaman sebagai industri unggulan yang mampu dipasarkan di luar Kabupaten Jember.

Potensi Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Lokal

PKK dan Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan kelembagaan masyarakat yang dibentuk pemerintah di Kelurahan Antirogo. Keberadaan kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pembekalan ketrampilan maupun pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Sebagai perangkat organisasi pemerintahan desa, PKK memiliki program kerja yang disebut dasa wisma. Pertemuan rutin PKK dilakukan sebulan sekali. Anggota PKK adalah ibu-ibu dan kaum perempuan. Namun PKK dan posyandu diselenggarakan ditingkat desa. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar perempuan di Kelurahan Antirogo mengungkapkan nilai manfaat untuk menjadi anggota PKK.

Selain organisasi PKK, di Kelurahan Antirogo juga terdapat Posyandu untuk membantu kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Akan tetapi posyandu belum berjalan maksimal. Dimana masih banyak ditemukan warga masyarakat yang enggan memeriksakan kesehatan ibu dan bayi ke posyandu. Masyarakat Antirogo lebih mempercayai keberadaan dukun beranak

dan melakukan pengobatan secara tradisional dibandingkan memeriksakan kesehatan pada tenaga medis yang telah membantu kader posyandu di Antirogo.

Sosial Budaya Di Tingkat Lokal

Kondisi sosial budaya masyarakat di Kelurahan Antirogo dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kehidupan beragama. Ketiga aspek tersebut akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kondisi sosial budaya adalah tradisi gotong royong yang diwujudkan dalam kegiatan membantu perbaikan rumah tetangga, memperbaiki masjid, mushola, jalan, saluran air, membersihkan tempat pemakaman umum, dan lain-lainnya. Dalam tradisi gotong royong antusias warga dapat terlihat ketika memperbaiki rumah tetangga serta memperbaiki masjid. Biasanya, kegiatan gotong-royong ini diawali dengan pengumuman kepada masyarakat dari takmir masjid atau tokoh keagamaan lokal. Masyarakat akan merespon dengan baik pengumuman tersebut dan mereka akan melaksanakan kegiatan gotong royong membangun masjid atau mushola. Kegiatan gotong royong ini biasanya dilakukan pada saat pembongkaran, pengecoran, dan pengangkutan barang-barang material yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dari waktu ke waktu kualitas kegiatan gotong royong mengalami pergeseran, jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu sebelum kapitalisasi pedesaan meluas. Pada masa lalu, menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti relatif mudah. Namun, saat ini kerja bakti hanya dilakukan oleh warga yang memiliki kesadaran sosial tinggi. Ada anggapan sebagian masyarakat, bahwa kerja bakti untuk membangun desa merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga pekerjaan tersebut harus disertai dana. Pandangan seperti ini terus menyebar kepada warga lainnya.

Selain tradisi gotong royong dalam bentuk fisik, masyarakat Kelurahan Antirogo juga memiliki budaya saling membantu dalam tradisi daur hidup seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, sakit dan kematian. Masyarakat memiliki tradisi saling menyumbang antar warga masyarakat yang melahirkan bayi. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu. Sumbangan yang diberikan biasanya

dalam bentuk barang, perlengkapan bayi, atau uang.

Saling menyumbang secara timbal-balik dalam khitanan juga masih cukup kuat. Acara khitanan dilakukan secara individual, kadang masal. Jika seorang warga yang memiliki hajat mengkhitanan anaknya itu juga pernah memberikan sumbangan pada acara yang sama, maka ketika ia berhajat juga akan menuai hal yang sama. Besar-kecilnya sumbangan ditentukan oleh kedekatan sosial dan kedermawanan orangnya. Besar sumbangan uang dari saudara dan tetangga sekitar Rp 10.000-Rp 30.000. Ada juga yang memberikan sumbangan berupa beras, gula, minyak, kelapa, dan sarimi. Sumbangan dari saudara dan tetangga dekat ini dicatat dan suatu saat dikembalikan apabila saudara dan tetangga yang telah menyumbang tersebut mempunyai hajat sama.

Hajatan perkawinan bersifat terbuka karena merupakan suatu kesaksian sosial, sebab tidak mungkin kegiatan ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Warga masyarakat harus tahu. Acara perkawinan harus dipersiapkan secara matang. Hal ini berbeda dengan khitanan, yang masih bisa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Pada saat acara perkawinan ini, para tetangga dan kerabat memberi sumbangan pada keluarga yang mempunyai hajat berupa uang dan barang. Barang itu bisa berupa gula, beras, kelapa, minyak, dan lainnya. Di Kelurahan Antirogo, sumbangan uang dari orang perempuan Rp 5.000 dengan bawah barang, sedangkan dari laki-laki Rp 10.000-Rp 20.000.

Fasilitas lain untuk menunjang acara perayaan perkawinan, seperti pembuatan *terop* juga dibuat secara bergotong royong yang melibatkan saudara dan tetangga dekat. Jika orang yang berhajat memiliki kemampuan ekonomi, biasanya dengan menyewa dari penyedia jasa *terop*. Penyewaan dilakukan karena lebih praktis dan efisien, di samping itu, kondisi *teropnya* bagus.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa di kelurahan Antirogo terdapat masyarakat yang masih belum memperoleh layanan pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah,

banyaknya masyarakat usia 5 tahun ke atas yang belum mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Akibatnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah. Hal inilah yang menyebabkan masih terdapat kantong kemiskinan. Mengingat, kelurahan Antirogo berada di pusat kota.

Akan tetapi, masih banyak ditemukan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi lokal tersebut diantaranya adalah berbagai aturan yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat di Antirogo dan diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Selain itu juga masih banyak potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola sebagai sumber penghasilan ekonomi. Sebagaimana munculnya industri unggulan anyaman.

Saran

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai potensi sumberdaya alam maupun manusia harus dapat dikembangkan sejalan. Hal ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu adanya pendidikan keaksaraan fungsional yang dapat memanfaatkan berbagai potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Freire, P. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Yogyakarta. LP3ES
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta. Pondok

Edukasi.

Marzuki, S. 2009. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Nonformal*. Malang. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Narayan, D. 2005. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*. Washington, DC. The Word Bank.

Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford

Press. Singarambun dan Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta.

LP3ES.

Smith, W. 2008. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sulistiyani, A. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media.

Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta. Global Pustaka Utama.

Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Elek Media Komputindo.

Yunus, F. 2004. *Pendidikan Berbasis Realitas*. Yogyakarta. Logung Pustaka.

Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Ar-ruzz Media Group.

